**PENGARUH *VALUE FOR MONEY* SERTA PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH TERHADAP AKUNTANBILITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH**

 **(Studi Kasus pada Kantor BPKAD Kota Palopo)**

**Iis Faradilla1, Junaidi2,Nispa Sari3**

*Universitas Muhammadiyah Palopo*

Jl. Jend Sudirman, 91922, Indonesia

*Email: iis30faradilla@gamail.com*

# ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui *Value for money* dan Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Penelitian ini dilaksanakann di BPKAD Kota Palopo. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan merupakan data primer. Responden dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai di kantor BPKAD Kota Palopo yang terlibat langsung dalam pengelolaan keuangan daerah yaitu Kepala BPKAD, Sekretariat, Bidang Anggaran dan Perbendaharaan , Bidang Aset Daerah dan Bidang Akuntansi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan rumus slovin. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode *simple random sampling* dengan 53 responden. Metode pengumpulan data yaitu survey dengan menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Skala pengukuran data dengan skala likert. Analisis pengaruh variabel menggunakan metode analisis regresi linear berganda. Hasil penelitian ini menunjukan pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah dan *value for money* berpengaruh signifikan dan positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Kata Kunci**: *value for money*, Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahdan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**ABSTRACT**

 *This study aims to determine the effect of the value for money and the application of government accounting standards on the accountability of regional financial management. This research was conducted at BPKAD Palopo City. This research is a research with a quantitative approach. The data used are primary data. Respondents in this study were all employees at the Palopo City BPKAD office who were directly involved in regional financial management, namely the Head of BPKAD, the Secretariat, the Budget and Treasury Division, the Regional Assets Division and the Accounting Division. The determination of the sample in this study was carried out using the Slovin formula. The sampling method used wasmethod simple random sampling with 53 respondents. The data collection method is a survey using a questionnaire distributed to respondents. Scale of data measurement with Likert scale. Analysis of the influence of variables using multiple linear regression analysis method. The results of this study indicate the effect of implementing government accounting standards and value for money has a significant and positive effect on the accountability of regional financial management.*

***Keywords****: value for money, Application of Government Accounting Standards, and accountability of regional financial management.*

**PENDAHULUAN**

Indoneisa saat ini memberlakukan sistem pemerintahan desentralisasi dimana untutan terhadap suatu daerah untuk menyelenggarakan pembangunan yang tepat dan dapat meningkatkan perekonomian daerah agar semakin tajam yang ditandai dengan adanya pemberlakuan otonomi daerah. Berdasarkan undang-undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, pemerintah daerah diberi kewenangan yang luas dalam menyelenggarakan semua urusan pemerintah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi yang ditetapkan peraturan pemerintah. Pemerintah daerah dapat menyesuaikan pembangunan daerah sesuai dengan potensi keuangan daerah untuk membuktikan bahwa mereka menjalankan kewenangan pemerintah (Purba, 2018).

 Pemberian hak otonomi daerah kepada pemerintah daerah untuk menentukan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) sendiri sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah. Adanya otonomi daerah, maka sangat dibutuhkan akuntanbilitas baik secara vertikal (kepada pemerintah atas) maupun secara horizontal (kepada masyarakat daerah) atas pengelolaan dana yang diberikan oleh pemerintah pusat (Syarifudin, 2020).

 Pada dasarnya akuntanbilitas adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja finansial kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mardiasmo, 2014). Terkait dengan masalah akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah tersebut maka dari itu pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Dalam Mentri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Akuntanbilitas dapat hidup dan berkembang dalam suasana yang transparan dan demokratis serta adanya kebebasan dalam mengemukakan pendapat. Oleh karena itu, pemerintah harus betul-betul menyadari bahwa pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan dari publik.

 Disuatu pemerintah wajib melakukan pengelolaan keuangan yang transparansi, akuntanbilitas, efesiensi serta evektivitas untuk mempertanggung jawabkan pelaksanaa keuangannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang didasarkan pada perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Untuk mewujudkan transparansi dan akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah yang baik maka dibutuhkan pertanggungjawaban masing-masing daerah atau penanggungjawab pengelolaan keuangan daerah yang dikeluarkan oleh suatu daerah yang disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintah (Hasanah, 2019). Akan tetapi diperlukan juga variabel independen seperti penerapan *value for money* dan standar akuntansi pemerintah sehingga apabila konsep ini berjalan, dengan demikian tujuan dari variabel dependen akan terlaksana dengan baik.

 Adapun beberapa hasil penelitian peneliti yang berkaitan dengan akuntanbilitas pengelolaan daerah yaitu, Mulyani (2018) menyatakan bahwa *value for money* tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah sedangkan Anita Daun Lamba (2020) menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntanbilitas pengelolaan keungan daerah, menurut Pramuditia (2017) menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah serta Nurwulan, Dkk (2019) menyatakan bahwa kinerja *value for money* berpengaruh secara signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

.

**TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS**

## Teori Stewardship

Menurut Hernandez (2008) *stewardship* didefenisikan sebagai sikap dan perilaku yang menempatkan kepentingan jangka panjang kelompok diatas tujuan pribadi yang melayani kepentingan pribai seseorang. Ini ada sejauh aktor organisasi mengambil tanggung jawab pribadi atas dampak tindakan organisasi terhadap kesejahteraan *stakeholder*. Davis *et al*., (1997) menemukan bahwa seorang pelayan menjaga dan memaksimalkan kekayaan pemegang saham melalui kinerja perusahaan.peningkatan kinerja peruasahaan mengakibatkan fungsi utilitas pelayanan dapat dimaksimalkan (Vallejo, 2009).

Teori *stewardship* dapat befungsi sebagai mekanisme pertanggungjawaban

untuk dapat memastikan pemantauan, audit dan pelaporan yang baik agar dapat membantu pencapaian tujuan organisasi (Crib, 2006). Teori  *stewardship* dapat diterapkan pada penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintahan yang sejak awal perkembangannya, akuntansi sektor publik telah dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi bagi hubungan antara *stewards* dengan *principals*.

### *Value For Money*

menurut mahmudi (2015), *value for money* adalah konsep dalam organisasi sektor publik yang memiliki pengertian penghargaan terhadap nilai uang. Pengukuran kinerja *value for money* adalah pengukuran kinerja untuk mengukur ekonomi, efisiensi, dan efektivitas suatu kegiatan, program, dan organisasi.

*Value for money* merupakan konsep prinsip-prinsip manajemen organisasi sektor publik yang fundamental terhadap tiga elemen utama (Mardiasmo, 2009), yaitu :

1. Ekonomi

Ekonomi adalah hubungan antara pasar dan input (biaya input). Dengan kata lain ekonomi adalah praktik pembelian barang dan jasa input dengan tingkat kualitas tertentu dengan harga terbaik. Dalam konteks organisasi pemerintahan, ukuran ekonomi adalah seberapa besar anggaran dialokasikan untuk membiayai kegiatan tertentu.

1. Efisiensi

Efisiensi adalah rasio keluaran / masukan yang digunakan dengan mengacu pada standar atau target kinerja yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses kegitan operasional dikatakan efisien apabila suatu produk atau pekerjaan tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah mungkin.

1. Efektivitas

Efektivitas adalah hubungan antara keluaran (*output*) dengan tujuan atau sasaran (*outcome*) yang harus dicapai. Semakin besar kontribusi keluaran untuk pencapaian tujuan, semakin efektif organisasi, program atau kegiatan tersebut. Suatu organisasi, program, atau kegiatan dianggap efektif apabila keluaran yang dihasilkan dapat memenuhi tujuan yang diharapkan.

### Standar Akuntansi Pemerintah

Standar akuntansi pemerintah (SAP) merupakan hasil dari undang-undang nomor 71 tahun 2010 adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Adapun definisi standar akuntansi pemerintahan menurut Indra Bastian (2010) adalah “standar akuntansi pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangn pemerintah. Dengan demikian SAP merupakan persyaratan yang mempunyai kekuatan hukum dalam upaya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia.

Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) adalah serangaian prosedur, operator, alat dan elemen lain yang sistematis untuk mewujudkan fungsi akuntansi dari saat analisis transaksi hingga pelaporan keuangan dalam organisasi pemerintah. Dalam peraturan pemerintah Nomor 71 tahun 2019, ruang kingcup pengaturan peraturan pemerintah ini meliputi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual dan standar akuntansi pemerintahan berbasis *cash to accrual.* Peraturan pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 menyatakan bahwa standar akuntansi pemerintah berbasis akrual adalah standar akuntansi pemerintah yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaopran financial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang telah ditetapkan dalam APBN/APBD.

### Akuntanbilitas Pengelolaan Daerah

Mardiasmo (2018) menyatakan bahwa akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah yang disampaikan melalui laporan keuangan secara terbuka kepada pihak yang mempunyai hak atas pertanggungjawaban tersebut. Menurut Setiana dan Yuliani (2017) akuntanbilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agent/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban. Menyajikan, melaporkan dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk pertanggungjawaban tersebut. Dengan kata lain akuntanbilitas pengelolaa daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta penatausahaan yang disertai dengan pertanggungjawaban yang harus benar-benar dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

**Hipotesis**

H1 : *value for money* berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah.

H2 : Penerapan standar akuntansi pemerintah berpengaruh terhadap akuntanbilitas pengelolaan keuangan daerah.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan jenis metode penelitian kuantitatif deskriptif, yang memberikan gambaran di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang. Lokasi pada penelitian ini dilakukan pada Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Palopo yang berada di Jl.Jend Sudirman no 163, Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo, Sulawesi Selatan, dengan waktu yang dingunakan dalam penelitian ini ±3 bulan terhitung bulan April sampai dengan Juni 2022 Menurut Sugiyono (2019) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut, dimana sampel di dalam penelitian ini sebanyak 40 responden. Adapun criteria pengambilan sampel yaitu pegawai yang lulusan minimal jenjang SMA dan telah bekerja ± 5 tahun. Teknik pengambilan sampel yang digunakan yaitu *convenience sampling* yaitu teknik pengumpulan sampel non-probability dimana pengambilan sampel didasarkan pada ketersediaan elemen yang ada dan kemudahan untuk mendapatkannya.

**HASIL DAN PEMBAHASAN**

**Uji Validitas**

Tabel 1 Uji Validitas

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | **Item**  | **r hitung** | **r tabel** | **Keterangan** |
| **Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah** | X2.1 | 0,635 | 0.294 | Valid |
| X2.2 | 0,816 | 0.294 | Valid |
| X2.3 | 0,727 | 0.294 | Valid |
|  | X2.4 | 0,740 | 0.294 | Valid  |
| X2.5 | 0,858 | 0.294 | Valid |
| X2.6 | 0,666 | 0.294 | Valid  |
|  | X2.7 | 0,817 | 0.294 | Valid  |
| X2.8 | 0,434 | 0.294 | Valid |
| X2.9 | 0,813 | 0.294 | Valid |
| X2.10 | 0,713 | 0.294 | Valid |
| ***Value For Money*** | X1.1 | 0,776 | 0.294 | Valid |
| X1.2 | 0.765 | 0.294 | Valid |
| X1.3 | 0,770 | 0.294 | Valid |
| X1.4 | 0,860 | 0.294 | Valid |
| X1.5 | 0,853 | 0.294 | Valid  |
| X1.6 | 0,300 | 0.294 | Valid |
| X1.7 | 0,587 | 0.294 | Valid  |
| X1.8 | 0,906 | 0.294 | Valid  |
| X1.9 | 0,755 | 0.294 | Valid |
| X1.10 | 0,722 | 0.294 | Valid |
| **Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah** | Y.1 | 0,722 | 0.294 | Valid |
| Y.2 | 0,776 | 0.294 | Valid |
| Y.3 | 0,563 | 0.294 | Valid |
| Y.4 | 0,846 | 0.294 | Valid |
| Y.5 | 0,744 | 0.294 | Valid |
| Y.6 | 0,807 | 0.294 | Valid |
| Y.7 | 0,847 | 0.294 | Valid |
|  | Y.8 | 0,817 | 0.294 | Valid |
| Y.9 | 0,758 | 0.294 | Valid |
| Y.10 | 0,682 | 0.294 | Valid |
|  | Y.11 | 0,736 | 0.294 | Valid |

Sumber : Data diolah diSPSS tahun 2022

Berdasarkan tabel 4.6 di atas, dapat diketahui bahwa semua item pernyataan untuk semua variabel adalah valid. Karena nilai *Corrected Item-Correlation*> dari r tabel pada signifikan 0,05 (5%).

**Uji Reliabilitas**

Tabel 2 Uji Reliabilitas

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Variabel** | ***Alpha Cronbach’s*** | **Batas Reliabilitas** | **Keterangan** |
| Value For Money (X1) | 0,901 | 0,60 | Reliabel |
| Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (X2) | 0,900 | 0,60 | Reliabel |
| Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Y) | 0,928 | 0,60 | Reliabel |

Sumber: Data diolah di SPSS tahun 2022

Berdasarkan Tabel 4.7 diatas dapat disimpulkan bahwa semua variabel yang digunakan dalam penelitian ini reliabel, karena nilai *Cronbach Alpha* dari variabel total lebih besar dari 0,60, sehingga cocok digunakan sebagai alat ukur alat angket dalam penelitian ini.

**Analisis Regresi Linear Sederhana**

Tabel 3 Analisis Regresi Linear Sederhana

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 3.515 | 4.457 |  | .789 | .435 |
| Value For Money (X1) | .498 | .134 | .476 | 3.719 | .001 |
| Standar Akuntansi Pemerintah (X2) | .536 | .159 | .431 | 3.369 | .002 |
| a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y) |

 Dari tabel hasil analisis regresi llinear berganda di atas, diperoleh koefisien veriabel bebas X₁ (Penerapan *Value for money*) sebesar 0,5360,498. dan koefisien variabel bebas X₂ (Penerapan standar akuntansi pemerintah*)* sebesar 0,536. Oleh karena itu, persamaan regresi yang diperoleh adalah

$$Y= 3,515+ 0,536 x\_{1}+0,498 x\_{2}+ e$$

Dimana:

$Y$ : Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

$x\_{1}$ : *Value For Money*

$x\_{2}$ : Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah

$e$ : Eror

Persamaan regresi linear di atas dapat diketahui bahwa:

1. Nilai konstanta untuk persamaan regresi berdasarkan perhitungan statistik di atas sebesar sebesar 3,515 artinya apabila variabel bebas bernilai nol maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kota Palopo tetap sebesar 3,515.
2. Nilai koefisien (β1) sebesar 0,498 menunjukkan bahwa *value for money* (X1) terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) **adalahpositif atau searah**, artinya jika ditingkatkan variabel *value for money* sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah akan mengalami kenaikan sebesar 0,498.
3. Nilai koefisien (β2) sebesar 0,536 menunjukkan bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah (X2) terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah (Y) **adalah positif atau searah,** artinya jika ditingkatkan variabel penerapan standar akuntansi pemerintah sebesar satu satuan, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan daerahakan mengalami kenaikan sebesar 0,536.

**Uji Hipotesis Parsial (Uji-t)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Model | Unstandardized Coefficients | Standardized Coefficients | T | Sig. |
| B | Std. Error | Beta |
| 1 | (Constant) | 3.515 | 4.457 |  | .789 | .435 |
|  | Standar Akuntansi Pemerintah (X₁) | .536 | .159 | .431 | 3.369 | .002 |
| Value For Money (X₂) | .498 | .134 | .476 | 3.719 | .001 |
| a. Dependent Variable: AKUNTABILITAS (Y) |

Berdasarkan data dari Tabel 4.12 diketahui nilai ttabel pada taraf signifikansi 5 % dengan persamaan sebagai berikut:

t tabel = n – k – 1: alpha/ 2

= 45 – 3 –1: 0,05/ 2

= 42 : 0,025

= 1,680

**Uji Koefisiensi Determinasi (R2)**

Tabel 5 Uji Koefisien Determinasi (R2)

|  |
| --- |
| **Model Summaryb** |
| Model | R | R Square | Adjusted R Square | Std. Error of the Estimate | Durbin-Watson |
| 1 | .857a | .735 | .722 | 2.60538 | 1.781 |
| a. Predictors: (Constant), Value for money, Penerapan standar akuntansi pemerintah |
| b. Dependent Variable: AKUNTABILITAS PENGELOLAAN (Y) |

Berdasarkan tebel koefisien determinasi di atas yang ditunjukkan oleh Adj. R2 dari persamaan regresi menghasilkan nilai sebesar 0,722. Hal ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh yang diberikan oleh variabel independen yang terdiri dari penerapan standar akuntansi dan *value for* money terhadap variabel dependen akuntntabilitas pengelolaan keuangan daerah adalah sebesar 72,2% sedangkan sisanya sebesar 27,8% dipengaruhi oleh faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini. Hal ini mengartikan bahwa masih ada faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

**Pembahasan**

### Pengaruh *value for money* terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah

Hipotesis kedua penelitian ini adalah untuk menguji apakah *value for money* berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel *value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Palopo. Hal ini terlihat dari uji hipotesis, koefisien regresi (β1) sebesar 0,498, dan nilai signifikansi 0,001 <0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *value for money* akan meningkatkan tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah. *Value for money* terkait dengan tolok ukur dalam anggaran organisasi sektor publik . Menurut Mahsun (2006: 132) *value for money* adalah evaluasi kinerja yang didasarkan pada ukuran ekonomi dan efisiensi. Dan efektivitas. Secara khusus, pemerintah daerah telah mampu menggunakan aspek ini dalam pengelolaan keuangan daerah dan sumber daya publik yang akuntabel kepada publik. Penerapan konsep value for money dalam proses penggunaan anggaran dapat menghasilkan manfaat yang sebesar-besarnya, dan aspek efektif penggunaan anggaran sejalan dengan visi, dan misi sasaran manfaat dapat tercapai sesuai dengan tujuan kepentingan masyarakat, sehingga meningkatkan rasa tanggung jawab keuangan.

 Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Primayani (2014) dan Shinta (2017) yang meyakini bahwa *value for money* berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa organisasi sektor publik dengan kinerja biaya tinggi akan menghasilkan target output yang baik.

### **Pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah**

Hipotesis pertama penelitian ini adalah menguji apakah terdapat pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Uji parsial (uji t) menunjukkan bahwa variabel penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo.Hal ini terlihat dari pengujian hipotesis dengan koefisien regresi (β2) sebesar 0,536 dan memiliki nilai signifikansi 0,002 <0,05.hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan akan berdampak akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, artinya apabila standar akuntansi pemerintahan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah No 71 Tahun 2010, maka akan berdampak pada penerapan standar keuangan pemerintah. laporan keuangan pemerintah Pelaporan akan lebih berkualitas, dan akan berkali-kali. Mendapatkan opini audit Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK. Pertanggungjawaban pemerintah atas keuangan nasional menjadi jelas dan lengkap.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Pramudita (2017) dan Zeyn (2011) yang berpendapat bahwa pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah karena pemerintah telah mampu untuk menerapkan basis kas untuk mengakui pendapatan dan pengeluaran, serta selalu mengoreksi setiap kesalahan dalam penyajian laporan keuangan sehingga ini menjadi bukti dari Kota Palopo yang sudah empat kali memenangkan WTP dari BPK atas pertanggungjawabannya dalam mengelola laporan keuangan.

**PENUTUP**

**Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis, maka pengujian dan pembahasan hipotesis yaitu Pengaruh *value for money* dan penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah pada kantor BPKAD Kota Palopo, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Value for money* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis kedua diterima.
2. Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Kantor BPKAD Kota Palopo. Sehingga hipotesis pertama diterima.

## 5.2 Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini telah disusun semaksimal mungkin namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang masih perlu dikembangkan dalam penelitian selanjutnya antara lain:

1. Kurangnya pemahaman dan sikap kepedulian dari responden di dalam menjawab pernyataan kuesioner yang diberikan peneliti. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan melengkapi penelitian dengan metode survei wawancara untuk meningkatkan sikap kepedulian dari responden dalam menjawab pernyataan kuesioner peneliti.

Peneliti hanya menggunakan dua variabel independen untuk mempengaruhi Akuntabilitas pengelolaan keuagan daerah

**Saran**

Berdasarkan evaluasi dari keterbatasan yang ada atas hasil penelitian, beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk peneliti selanjutnya, antara lain:

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk mendapatkan hasil yang maksimal diperlukan sampel yang lebih banyak.
2. Pengumpulan data pada penelitian selanjutnya diharapkan tidak hanya sebatas penyebaran kuesioner saja tetapi dapat juga dilakukan dengan pengamatan, dokumentasi, observasi serta wawancara langsung ke objek penelitian.
3. Kehadiran peneliti pada saat responden melakukan pengisian kuesioner sangat ditekankan untuk memastikan bahwa responden mengerti maksud dari kuesioner yang akan diisi agar data yang diperoleh nantinya tidak bias dan sesuai dengan tujuan dan apa yang diharapkan dalam penelitian.

**DAFTAR PUSTAKA**

Anita Daun Lamba (2020). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah dan *Value For Money* Terhadap Akuntatabilitas Pengeloaan Keuangan Daerah (Studi Kasus Pada Kantor BPKAD Kota Palopo).

Bastian, I. (2019). Lingkup Akuntansi Sektor Publik. *Lingkup Akuntansi Sektor Publik*.

Davis, J. H., Schoorman, F. Davi., dan Donaldson, Lex. 1997. *Towards a Stewardship Ttheory of Management. Academy of Management Review*, 221, 20–47.

Ghozali, I. 2011. *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS*. Universitas Semarang. Semarang.

Hasanah, Y. A., Sasongko, N., & Bawono, A. D. B. (2019). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Peran Internal Audit, dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Pada Skpd Di Pemerintah Kabupaten Sukoharjo). *The 9th University Research Colloqium (Urecol)*, *9*(5).

Indra Bastian. 2010. *Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga

Julie Abdullah (2018), Pengaruh Penerapan Dimensi *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Publik Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Pohuwato.

Mahmudi. 2011. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: UII Press.

Maya Angelicca (2019), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah Studi Di Pemerintah Daerah Kab. Lamandau Kalimantan Tengah.

Mulyani, S. (2018).Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan, *Value For Money*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Kasus SKPD Pemerintah Daerah Kabupaten Pekalongan Tahun 2018) (Doctoral dissertation, Universitas STIKUBANK).

Nunuy Nur Afiah. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.

Nunuy Nur Afiah. 2009. Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi Keuangan pemerintah Daerah. Jakarta: Prenada Media Group.

Nurwulan, Dkk (2019) Pengaruh Efektivitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dan Kinerja *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Survey Pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan, Badan Pendapatan Daerah dan Inspektorat Di Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi).

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2019 Tentang pengelolaan keuangan daerah.

Pramuditia (2017) Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi *, Value For Money*,Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Empiris Pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) Kabupaten Ponogoro).

Purba R, B (2018). Pengaruh Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Transparansi Publik dan Aktivitas Pengendalian terhadap Akuntablitas Keuangan Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanah Datar. Jurnal Akuntansi Bisnis dan Publik. Vol 8 (1).

Sako, U., & Lantowa, F. D. (2018). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Penyajian Laporan Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Gorontalo.

Sayuti. 2018. Perwujudan Nilai-Nilai Transparansi, Akuntabilitas dan Konsep *Value For Money* dalam Pengelolaan Akuntansi Keuangan Sektor Publik pada Bappeda Kabupaten Gowa.Skripsi. Makassar. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.

SELVI, M. (2020). Pengaruh Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Akuntabilitas Laporan Keuangan (*Doctoral dissertation*, Universitas Muhammadiyah Palopo).

Shintia(2017), Pengaruh Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Pengendalian Internal Dan *Value For Money* Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah ( Studi Kasus Pada SKPD Kabupaten Kudus ).

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D).* Cetakan Ketujuh Belas. Alfabeta. Bandung.

Syarifudin M, Kms (2020) Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Pengendalian Internal, dan Transparansi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Dengan Sebagai Variabel Moderasi ( Studi Kasus Pada Organisasi Perangkat *Value For Money* Daerah Pemerintah Kota Palembang ). Skripsi.Universitas Muhammadiyah Palembang.

Undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.

Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Lpaoran Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas.

Wahida, N. 2015. Pengaruh Penyajian Lpaoran Keuangan Daerah dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Daerah Terhadap Akuntabilitas.

 Yani, A. A.(2020), Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, Konsep *Value For Money*, dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah Di Era Digital (Di Badan Keuangan dan Aset Daerah (Bkad) Provinsi Sulawesi Selatan).